

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
DI KECAMATAN LABAKKANG  
KABUPATEN PANGKEP**



Oleh :

**MUHAMMAD SYABIR SUYUTI  
4594021017 / 994 111051 0042**

**Skripsi sebagai salah syarat  
untuk menempuh Ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2000**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"

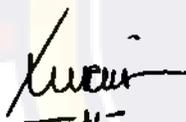
Makassar :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SYABIR SUYUTI  
No. Stambuk/nirm : 4594021017 / 9941110510042  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN  
LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I.

PEMBIMBING II,



DRA. NURMI NONCI, MSi



DRS. UDIN B. SORE

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN,

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sospol Universitas "45" Makassar



DEKANATASIPOL UNIV "45"

U.b. Pembantu Dekan I

DRA. NURMI NONCI, MSi

KETUA JURUSAN  
ILMU ADMINISTRASI

DRS. MARTHEN DP.



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 Skripsi dengan judul:

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”

N a m a : **MUHAMMAD SYABIR SUYUTI**

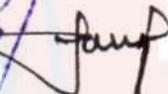
Stambuk / NIRM : 4594021017 / 9941110510042

Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam bidang Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.



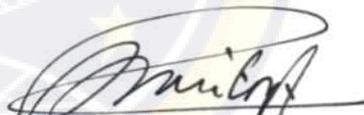
Pengawas Umum

  
**DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA**  
REKTOR UNIVERSITAS 45

  
  
**DRS. HUSAIN HAMKA, MS**  
DEKAN FISIPOL UNIV. 45

Panitia Ujian

  
**DRA. NURMI NONCL, MSi**  
KETUA

  
**DRS. MARTEN D. PALOBO**  
SEKRETARIS

Tim Penguji

- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Prof. A.R. Paembonan, MS       | Ketua   | (.....) |
| 2. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS | Anggota | (.....) |
| 3. Drs. Husain Hamka, MS          | Anggota | (.....) |
| 4. Dra. Juharni, MSi              | Anggota | (.....) |

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas petunjuk dan ismin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Waktu perkuliahan yang cukup panjang dan melelahkan telah meninggalkan berbagai kesan suka dan duka bagi penulis yang tidak mudah terlupakan. Dimasa perkuliahan sampai lahirnya karya tulis ini penulis mengalami berbagai hambatan, tetapi berkat ketabahan, ketekunan serta keinginan untuk maju, ditambah bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka semuanya teratasi dengan baik. Sebab itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
2. Bapak Drs. Marten DP selaku ketua jurusan ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
3. Ibu Dra. Nurmi Nanci, MSi, selaku pembimbing I dan Drs. Udin B. Sore selaku pembimbing II atas budi baik serta kerelaan hati membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan Dosen Ilmu administrasi pada khususnya, yang selama ini rela menyumbangkan pengetahuan yang kepada penulis.
5. Seluruh pengawai (karyawan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah turut membantu menyelesaikan kepentingan administrasi penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Saudara seperjuangan sesama mahasiswa pada jurusan Ilmu Administrasi, Saudara Amrin M Loah, Maulana Asikin, Husriani, Zulkarnaini, Alimuddin, serta yang tercinta Haslinda serta yang tidak sempat disebut namanya, yang kesemuanya telah banyak memberikan bantuan moril dalam rangka penyelesaian studi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta yang selama ini dengan setia memberikan perhatian dan bantuan yang tidak ternilai harganya didalam menyelesaikan simbol kemahasiswaan penulis pada jenjang strata satu (SI).

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin menghadirkan karya tulis terbaik, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kehilapan, maka didalam skripsi ini tentunya masih terdapat berbagai kekurangan. Sebab itu penulis mengharapkan masukan atau kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang berguna untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi siapa saja yang memerlukannya.

AMIN.

Makassar, Oktober 2000

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Partisipasi .....	14
B. Pengertian Pembangunan .....	18
C. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa .....	21
D. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa .....	23
E. Tujuan Inpres Bantuan Desa .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Labakkang .....	28
B. Keadaan Geografi .....	29
C. Keadaan Demografi .....	31

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
<b>A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses</b> <b>Pembangunan Desa</b> .....	<b>38</b>
<b>B. Bentuk Partisipasi yang Menonjol dalam</b> <b>Pembangunan di Kecamatan Labakkang</b> .....	<b>42</b>
<b>C. Faktor-faktor yang Menghambat dalam</b> <b>Pelaksanaan Pembangunan</b> .....	<b>49</b>
<b>D. Langkah-langkah yang Ditempuh dalam</b> <b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam</b> <b>Pembangunan</b> .....	<b>55</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>65</b>
<b>B. Saran-Saran</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Luas daerah kecamatan Labakkang per desa/kelurahan .....	30
2	Data potensi kecamatan Labakkang/kelurahan/desa .....	37
3	Tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa .....	41
4	Bentuk partisipasi masyarakat yang menonjol dalam pembangunan di Kecamatan Labakkang .....	44
5	Tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Labakkang .....	46
6	Tanggapan responden terhadap animo masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan .....	48
7	Tanggapan responden tentang faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan .....	49
8	Penilaian masyarakat terhadap kegunaan prasarana produksi .....	59
9	Penilaian masyarakat terhadap kegunaan prasarana sosial .....	59
10	Bentuk-bentuk swadaya responden .....	60
11	Motif keikutsertaan responden dalam pembiayaan proyek fisik .....	61
12	Faktor-faktor yang dapat memperlancar timbulnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	64

## ABSTRAK

Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka dilaksanakan pembangunan menyeluruh di seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam rangka menuju masyarakat yang dicita-citakan, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang benar-benar dapat menjadi sarana perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pembangunan bukan hanya dilakukan di daerah perkotaan, tetapi juga dilaksanakan sampai kedaerah pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia ini, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh rakyat harus berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam pembangunan dan didasarkan atas swadaya masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan pada dasarnya merupakan imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat, maka dalam usaha pembangunan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bantuan kepada

masyarakat agar semakin mampu melaksanakan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan itulah, dalam kaitannya dengan upaya untuk melaksanakan pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan, serta dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diberikanlah setiap desa berupa Inpres Bantuan Pembangunan Deasa sejak Repelita Ketiga termasuk desa-desa dan kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam wilayah yang bersangkutan.

Bantuan Pembangunan Deasa yang diberika kepada setiap desa atau kelurahan diwilayah kecamatan Labakkang telah berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat, maupun dalam melengkapi berbagai prasarana untuk setiap desa dan kelurahan sebagai penunjang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa masalah yang dihadapi, dan masalah-masalah tersebut sebagian telah ditanggulangi dan sebagian lainnya masih tetap berlangsung dan terus diusahakan pemecahannya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan pemerintah menetapkan tahapan-tahapan yang dituangkan dalam rencana pembangunan. Dimana dalam setiap pembangunan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat. Untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Berdasarkan dengan hasil pembangunan yang telah dicapai sampai sekarang, maka bangsa Indonesia ai bertekad untuk mempercepat tujuan utama pembangunan yaitu terciptanya landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendirinya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan yang kuat meliputi : Ekonomi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Untuk menciptakan kerangka landasan perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberikan ransangan serta peluang seluas-luasnya bagi semua potensi pembangunan untuk berpartisipasi dalam usaha pembangunan nasional serta mengusahakan keseimbangan dan keserasian di berbagai bidang agar pembangunan lebih merata di seluruh tanah air, untuk itu pemerintah memberikan bantuan terhadap pembangunan desa.

Dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan daerah agar mencapisasaran yang diinginkan, maka partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab tanpa dukungan dari seluruh masyarakat maka setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sudah barang tentu tidak terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk kesadaran masyarakat diharapkan untuk turut aktif dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam proses pembangunan yang dilakukan di daerahnya.

Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak proses pembangunan itu juga dapat menimbulkan perluasan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokoramidjojo, (1985 : 225) dijelaskan sebagai berikut :

Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi, misalnya dengan pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja, dan adanya kesempatan itu, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat di dalamnya adalah bentuk partisipasi yang paling besar.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa proses pembanguana tersebut tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat saja. Namun yang menjadi masalah sekarang ini bagaimana impelementasinya, yaitu ada atau tidaknya partisipasi masyarakat secara sukarela serta bagaimana menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan sebab partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas dalam pembangunan melainkan juga dalam proses perencanaan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu :

- a. Secara bertahap membebaskan semua sewa dari keterpencilan dengan pembangunan prasarana perhubungan yang dapat memperlancar hubungan desa dengan kecamatan dan kota.
- b. Menata kembali daerah-daerah yang terlalu padat penduduknya.

- c. **Meningkatkan mutu aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan administrasi pemerintah bagi kelancaran pembangunan. Khususnya pembangunan daerah serta dapat mendorong penduduk untuk dapat berprakarsa dalam pembangunan menggerakkan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan.**
- d. **Menggerakkan koordinasi terhadap semua program pembangunan Daerah.**
- e. **Memberikan bantuan terhadap pembangunan daerah untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat.**

Namun demikian, telah berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah yang ditempuh, akan tetapi kenyataan sekarang ini masalah-masalah yang dihadapi desa dipandang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. **Masih terdapat desa yang tertinggal dari pembangunan, seperti desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan.**
- b. **Lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.**
- c. **Tingkat kesadaran dan keterampilan penduduk belum memadai menyebabkan produktivitas pendapatan penduduk masih rendah.**

Dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan Desa seperti diuraikan di atas, maka terdorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Peranan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Desa kecamatan Labakkang Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan".

#### **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

Seperti diketahui bahwa pembangunan itu tidak lain adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang terencana. Oleh karena pembangunan berarti suatu masa depan dengan proses perubahan dari keadaan yang kurang baik, menuju keadaan yang lebih baik. Agar kegiatan tersebut dapat berkjalan dengan lancar, teratur dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu ada perencanaan pelaksanaan dan pengawasan yang lebih sistimatis.

Proses pembangunan desa yang dilaksanakan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti masalah ekonomi dan masalah sosial. Dari segi pelaksanaanya masih kurangnya tenaga terampil serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentinnya pembangunan masih rendah.

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa Kecamatan Labakkang

kabupaten Dati II Pangkajene Kepulauan, maka untuk lebih sistematisnya penyusunan skripsi ini perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten Dati II Pangkep.
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembangunan desa.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten Dati II Pangkajene Kepulauan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dala melaksanakan pembangunan desa.
- c. Untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai, sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan terhadap pembangunan desa.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan dengan daerah-daerah lain.
- c. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan di perpustakaan dan menjadi bahan informasi bagi yang memerlukan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk pemerataan pembangunan keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah berusaha terus untuk meningkatkan pembangua di daerah-daerah. Untuk mencapai usaha tersebut pemerintah mengambil kebijaksanaan inpers bantuan desa yang diberikan kepada daerah-daerah pada setiap tahun anggaran, kebijakan tersebut dimulai pada repelita pertama. Tujuan pemberian bantuan desa tersebut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan mereka dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana.

Selain tujuan pemberian inpers tersebut juga ditujukan untuk merangsang masyarakat agar dapat turut serta dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.

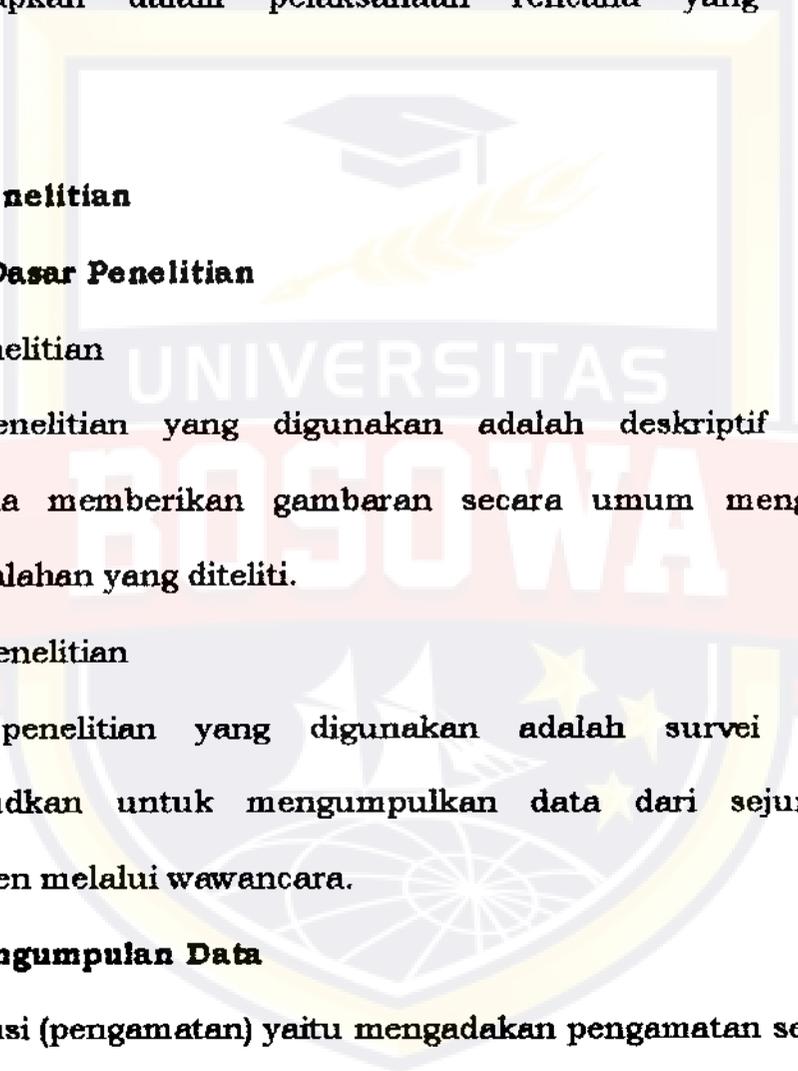
Untuk nilai-nilai atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat perlu didorong agar dapat bernilai positif terhadap kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat I Nyoman Beratha, (1982 : 71) menjelaskan bahwa :

“Institusi-institusi kemasyarakatan seperti gotong royong, femupakatan, pemusyawaratan dan lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapat berkembang dan untuk kehidupan nasional pada umumnya”.

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa pembangunan itu dapat berjalan lancar apabila didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar memberikan motivasinya. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemerintah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan bagaimana partisipasinya, dapat dilihat pada gambar skema konseptual sebagai berikut :



Dari gambaran diatas, nampak bahwa pemerintah dalam era pembangunan dewasa ini, dalam upaya merangsang masyarakat



untuk turut serta dalam berpartisipasi oleh setiap pembangunan yang dilaksanakan, maka disiapkan berbagai sarana-sarana pembangunan agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe dan Dasar Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang diteliti.

#### **b. Dasar Penelitian**

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui wawancara.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti yang sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Wawancara (Interview) yaitu penulis mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung kepada responden yang

dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti khususnya masalah pembangunan.

- c. Angket/Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengedarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden yang terlebih dahulu ditentukan melalui sampel.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa/Kelurahan yang ada dikecamatan Labakkang Kabupaten Daerah Dati II Pangkajene Kepulauan berjumlah 4 (empat) kelurahan 9 (sembilan) Desa, yaitu dengan jumlah penduduk 40.080, tokoh-tokoh masyarakat 80 orang.

#### **b. Sampel**

Jumlah responden yang dipilih berdasarkan teknik penerikan sampel yaitu : populasi sampel (sampel jenuh). Adapun yang menjadi respoden dalam penelitian ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setiap kelurahan/desa yang ada di kecamatan Labakkang sebanyak 80 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Kelurahan Labakkang sebanyak 20 orang terdiri dari :

Tokoh Tani                      5 orang

Tokoh Adat                    5 orang

Tokoh pendidik                5 orang

Tokoh Agama                  5 orang

Pemerintah Setempat

➤ Kelurahan Pundata Baji sebanyak 20 orang terdiri dari :

Tokoh Tani                    5 orang

Tokoh Adat                    5 orang

Tokoh pendidik                5 orang

Tokoh Agama                  5 orang

Pemerintah Setempat

➤ Kelurahan Bori Masunggu sebanyak 20 orang terdiri dari :

Tokoh Tani                    5 orang

Tokoh Adat                    5 orang

Tokoh pendidik                5 orang

Tokoh Agama                  5 orang

Pemerintah Setempat

➤ Kelurahan Manggallekana sebanyak 20 orang terdiri :

Tokoh Tani                    5 orang

Tokoh Adat                    5 orang

Tokoh pendidik                5 orang

Tokoh Agama                  5 orang

Pemerintah Setempat

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang dikumpulkan dari responden mula-mula diklasifikasikan dan diedit dan diberikan kode. selanjutnya disusun dalam tabel-tabel prekuensi atau presentase agar mudah dianalisis secara kualitatif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pembahasan skripsi ini maka disusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

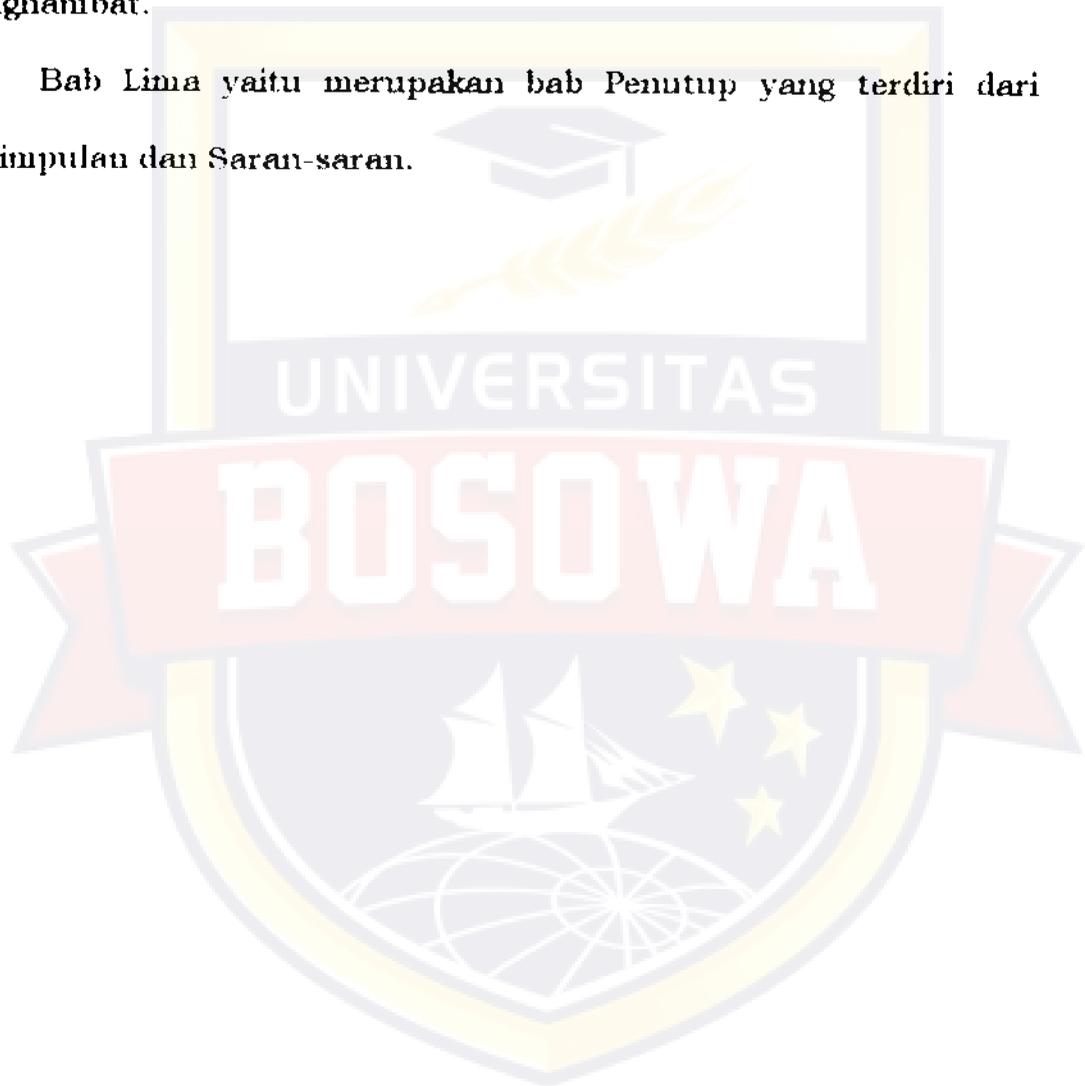
Bab Pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembahasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang beberapa pengetahuan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Bab Tiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang memuat Geografis, Keadaan Demografis, Struktur Organisasi Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Bab Keempat Yaitu, Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan pembahasan yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Hasil-Hasil yang dicapai, dan faktor-faktor Penghambat.

Bab Lima yaitu merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### A. Pengertian Partisipasi

Pengertian Partisipasi berasal dari bahasa asing yaitu Participation yang berarti mengikut sertakan pihak lain. Namun demikian, Pengertian Partisipasi yang lebih jelas yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamijoyo, (1985 : 224) mengemukakan bahwa :

“Partisipasi adalah suatu kegiatan kemasyarakatan atas dasar kesukarelaan tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan dan Iklim Tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilitas, yaitu Gotong-Royong”.

Pada dasarnya gotong-royong tersebut adalah berdasarkan kesukarelaan, saling membantu bekerja untuk suatu kegiatan yang menyangkut sebagian anggota atau kepentingan seluruh anggota masyarakat. Ikatan kemasyarakatannya adalah ikatan tempat ataupun berdasarkan pada suatu ikatan tradisional lain. Ia menjadi mobilitas apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan dengan cara gotong-royong.

Selain dari pengertian tersebut, pengertian partisipasi juga terdapat dalam diklat bunga rampai administrasi pembangunan yang

dikemukakan oleh M. Syukur Abdullah, (1987 :76) menjelaskan bahwa :

“Partisipasi ialah sikap tanggap masyarakat lokal (loka response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru tentang pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti impestasi) modal, waktu tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan pembangunan”.

Dari uraian tersebut nampak bahwa partisipasi itu tidak lain ialah sikap masyarakat. Bila dikaitkan dengan proses pembangunan sikap masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilaksanakan, yang mana masyarakat itu secara suka rela turut serta didalamnya.

Adapun bentuk dan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu :

### **1. Bentuk Partisipasi**

Dalam Aplikasi bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya menurut R.A Santoso Sastropetro membagi bentuk partisipasi dalam bentuk seperti di bawah ini :

1. Konsultasi
2. Sumbangan spontan berupa uang atau barang

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan tenaga ahli setempat
6. Aksi massa
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri
8. Membuat proyek komunitas yang bersifat otonom.

(R.A. Santoso Sastropetro, 1986 : 16)

Dari delapan bentuk partisipasi yang dimaksudkan diatas, yang paling sering kita temukan dikalangan masyarakat secara umum dan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan khususnya adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan spontan berupa uang dan barang yang biasanya disebut dengan swadaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk kerja yang biasanya disebut gotong-royong.

## **2. Jenis-jenis Partisipasi**

Menurut jenisnya R.A. Santoso Sastropetro, membagi atas enam jenis partisipasi sebagai berikut :

1. Pikiran (Psychological Participation)
  2. Tenaga (Phisical Participation)
  3. Pikiran dan tenaga (Psychological and Phisical Participation)
  4. Keahlian (Participation With Skill)
  5. Uang ( Material Participation)
  6. Uang ( Money Participation),
- (R.A Santoso Saatropetro, 1986 :16)

Partisipasi dalam bentuk pikiran biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau warga yang kurang mampu untuk memberikan partisipasi dalam bentuk uang. Sedangkan partisipasi yang ketiga ialah merupakan bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang dimiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi dibanding dengan masyarakat perkotaan.

Sedangkan dalam bentuk keahlian dibidang dilakukan oleh para warga masyarakat yang memiliki keahlian dibidang tertentu, misalnya tukang kayu, tukang batu.

Lain halnya dengan jenis partisipasi dalam bentuk uang dan barang, biasanya dilakukan oleh warga masyarakat yang tidak memiliki keahlian secara fisik dan kurang memiliki waktu yang cukup untuk menyumbangkan tenaganya, akan tetapi memiliki kemampuan materil dan biasanya partisipasi dalam

bentuk ini dilakukan warga masyarakat yang tingkat ekonominya lebih mapan.

## **B. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha perubahan menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia, dan sosial budaya inilah yang disebut pembangunan.

Suatu bangsa dalam pembangunan nasional sebenarnya adalah : merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa tersebut untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyatnya. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk perbaharui kehidupan nasional. Untuk memberikan pengertian yang lebih mendasar tentang arti serta makna pembangunan itu maka ada baiknya kita tinjau beberapa batasan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli antara lain :

“Pembangunan itu adalah suatu proses dimana orang atau masyarakat desa mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakannya bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut.”

Agar suatu pembangunan memperoleh sukses dan lancar maka momentum yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk menggerakkan usaha yang lain, disamping maka dalam pembangunan ini pun kita harus bekerja secara bertahap. Kita mulai dengan hal-hal yang sudah kita kenal di daerah itu kemudian meningkatkan kepada hal-hal yang modern setelah usaha pertama mencapai sukses.

Menurut Prof. Dr.S.P. Siagian, MPA, (1982 : 1-2) menjelaskan bahwa :

“Pembangunan adalah suatu usaha rangkaian pertumbuhan pembangunan yang berencana secara sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.”

Apabila pengertian di atas dianalisa lebih lanjut maka akan terlihat beberapa pengertian pokok yang sangat penting diperhatikan seperti :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang berti dalam suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembanguna merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana berorientasi terhadap pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan itu ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut MR. Soetomo S. Honggowongso, (1986 : 25) mengemukakan bahwa :

“Istilah pembangunan masyarakat desa mula-mula hanya pembangunan masyarakat saja, sesuai dengan istilah asli asingnya Commoniti Development, rasa-rasanya yang asli di Indonesia adalah D nya (desa) saja dari pembangunan masyarakat desa (PMD). Jadi Village Community Development sebab istilah-istilah dilain negara pada umumnya hanya CD atau rudal CD misalnya Birma, kemudian di Indonesia pada akhir-akhir ini terkenal istilah pembangunan desa dimana dalam istilah desa sudah tercakup pengertian masyarakatnya.”

Pada pokoknya istilah-istilah seperti pembangunan masyarakat desa, modernisasi desa pembangunan desa sebenarnya mengandung pengertian bahwa :

“Peningkatan masyarakat pedesaan akan mencegah derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Disamping itu perluasan kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program kerja khususnya antara lain pembangunan proyek padat karya di daerah pedesaan yang kenyataannya merupakan sumber tenaga kerja.”

Pembangunan masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut di atas dimaksudkan untuk mempertinggi hasil usaha setiap anggota masyarakat desa yang berarti pula mempertinggi penghasilan dan tingkat kehidupan masyarakat dan desa itu sendiri.

Pembangunan masyarakat pedesaan adalah dengan menitik beratkan keinginan dan kesadaran masyarakat pedesaan dan pemerintah desa yang bersangkutan dengan menghidupkan dan memupuk serta membimbing rakyat dengan berbagai usaha-usaha dan bantuan-bantuannya. Hal ini harus berpegang pada prinsipnya dan asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam musyawarah dan mufakat.

Pembangunan masyarakat desa baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan atas usaha sadar dari masyarakat desa tersebut yang disertai dengan keinginan dan perhatian yang jelas.

### **C. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa**

Tujuan pembangunan masyarakat desa setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dan prinsip dan fundamental dari pembangunan masyarakat desa di Indonesia adalah bahwa dalam jangka pendek bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat di desa. Sedangkan tujuan jangka panjang pembangunan masyarakat desa adalah identik dengan tujuan jangka pembanguana nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam GBHN di jelaskan bahwa :

“ ... Tujuan pemnbangunan nasional adlah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu suasana kehidupan prikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan damai dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, tertib dan damai.”

Berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa pembangunan masyarakat desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang merupakan pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan akan secara bertahapyaitu lima tahun yang dituangkan dalam rencana pembangunan.

Tujuan setiap tahap pembangunan adalah sama yaitu :

a. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

b. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya secara berkesinambungan.

Dengan tujuan ganda tersebut bahwa dalam setiap tahap pembangunan akan diusahakan agar setiap rakyat segera dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan berupa kesejahteraan lahir bathin sambil mempersiapkan tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran utama pembangunan jangka adalah pembangunan bidang ekonomi dengan tujuan utama adalah untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat banyak.

#### **D. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa.**

Berbicara tentang kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pembangunan desa, maka dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud meliputi berbagai bidang, hal ini dilakukan karena pembangunan nasional meliputi seluruh lapangan hidup masyarakat yang bersangkutan, serta harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa sebagai perbaikan tingkat hidup dan kesejahteraan.

Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud seperti adanya penelitian yang saksama mengenai kedudukan setiap desa dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa

pemerintah berusaha mengetahui sejauhmana peranan desa mengembangkan daerah secara menyeluruh dan dinamis, sehingga dapat menjadi bahan untuk menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.

Selain penelitian, salah satu kebijaksanaan pemerintah yaitu meningkatkan penguasaan dan keterampilan masyarakat desa yang akan diarahkan kepada usaha meningkatkan produktifitas. Kebijakan-kebijaksanaan dikaitkan dengan memperhatikan mekanisme yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, yang dilandasi dengan suasana yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan, gotong-royong, tatakerja tradisional dan sebagainya.

Selanjutnya ditetapkan juga kebijaksanaan lain yaitu dengan menstimulir lembaga perkreditan desa untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan masyarakat desa pada umumnya.

Selain daripada itu, pemerintah juga menetapkan kebijaksanaan dengan mengusahakan bantuan material kepada masyarakat untuk menghimpun dan meningkatkan serta mengintensifkan cara kerja gotong royong yang diarahkan kepada usaha-usaha untuk menunjang suksesnya pembangunan. Guna untuk melengkapi dan menyempurnakan sarana-sarana produksi, perhubungan dan prasarana lainnya, bantuan tersebut tidak

diperuntukan bagi keperluan yang bersifat konsumtif, melainkan untuk membantu untuk mendapatkan bahan yang tidak dapat diperoleh di daerah yang bersangkutan, kebijaksanaan ini dikenal dengan bantuan pembangunan yang didasarkan atas instruksi presiden dalam setiap tahun anggaran.

Kebijaksanaan lainnya yang merupakan kebijaksanaan yang sangat menentukan yaitu mengefektifkan struktur pemerintahan desa yang dibarengi dengan lembaga-lembaga desa sehingga dengan demikian dapat diwujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

#### **E. Tujuan Inpres bantuan desa.**

Inpres bantuan desa untuk pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap kelurahan/desa di seluruh plosok tanah air pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup agar terdapat keseimbangan didalam pertumbuhan desa dengan berusaha memancing swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan dan usaha-usaha yang pada akhirnya dapat membentuk kekuatan pembangunan.

Sebagaimana diketahui sekitar 80 % penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan oleh karena itu maka pembangunan

kelurahan/desa mempunyai arti yang sangat penting. Dalam GBHN diamanatkan bahwa perhatian yang sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan kelurahan / pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan kelurahan/desa implementasi dari kebijaksanaan pemerintah ini yaitu impres bantuan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

Didalam himpunan peraturan pokok bantuan pembangunan desa dinyatakan bahwa:

1. Pemberian bantuan pembangunan desa yang selanjutnya bertujuan untuk mendorong dan mengerahkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa.
2. Bantuan digunakan untuk menggunakan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat atau tersedia didesa.
3. Bantuan tersebut pada dasarnya digunakan untuk membantu desa-desa dalam usaha pembangunan perasarana-perasarana desa meliputi prasaranaa produksi desa, prasarana perhubungan desa, prasarana pemasaran desa, dan prasarana sosial. Untuk satuan wilayah setingkat desa dalam, bantuan dapat digunakan untuk perbaikan

dan pembangunan satuan wilayah dalam pembangunan, lingkungan kota-kota yang dimaksud.

4. Usaha-usaha pembangunan sarana desa dalam membentuk proyek yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dalam proses pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya didaerah pedesaan yang serasi dengan pembangunan.

Dengan melihat tujuan daripada pemberian bantuan oleh pemerintahan pusat kepada setiap kelurahan/desa di Indonesia, maka dapatlah memberikan kepada kita bahwa partisipasi masyarakat baik dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan desa maupun usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa sendiri dapat menunjukkan usaha-usaha pembangunan pada umumnya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Labakkang**

Kecamatan Labakkang merupakan salah satu kecamatan yang mendapat pemekaran. Kecamatan Labakkang merupakan perpecahan dari kecamatan Bungoro tahun 1950.

Selama berdirinya kecamatan Labakkang ini berfungsi sebagai pemerintahan ditingkat kecamatan dan sebagai fungsinya langsung melaksanakan pemerintahan dalam mensukseskan serta merencanakan, merealisasikan program yang telah direncanakan dan ditetapkan ditingkat kecamatan merupakan wujud realisasi sebagai fungsi wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pemerintahan dan berfungsi sebagai Administrator. Fungsi merealisasikan di segala bidang, stabilitas dan dinamisator menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984.

Pada masa pembentukannya yaitu pada tahun 1950 dimana Kecamatan Labakkang terdiri dari 4 kelurahan, 9 desa ini dalam pemerintahannya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan berupaya untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Kemudian pada tahun 1980 berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan desa, ditetapkan Menteri dalam Negeri nomor 44

tahun 1980, tentang pedoman susunan organisasi tata kerja pemerintahan kelurahan, sehingga dari nama lingkungan berubah menjadi kelurahan dimana dalam hal ini adalah kelurahan Labakkang, kelurahan Mangllekana, kelurahan Pundata Baji, dan kelurahan Bori Masunggu.

### **B. Keadaan Geografis**

Untuk memberikan gambaran tentang potensi wilayah kecamatan Labakkang dalam pembangunan, maka dalam bagian ini akan beberapa hal yang dianggap perlu mendapat perhatian termasuk faktor geografis. Oleh karena itulah maka bab ini akan kami ketengahkan beberapa aspek geografis kecamatan Labakkang sebagai salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Secara geografis kecamatan Labakkang merupakan daerah yang termasuk dataran rendah, kecamatan ini hanya berada diketinggian 0 sampai dengan 500 meter diatas permukaan air laut, mengenai iklim dikecamatan ini sepanjang tahun terjadi pergantian musim yaitu:

- Musim hujan terjadi pada bulan Nopember sampai April.

- Musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober, suhu udaranya berkisar antara 23 °C sampai dengan 32 °C dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bungoro.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar/Liukan Tupabbiring.
- Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bone/ Kecamatan Buton.

Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini terletak di bagian selatan yang terdiri dari 9 desa, 4 kelurahan. Adapun keempat kelurahan ini dapat diperinci dari luas masing-masing Kelurahan dan Desa seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 01  
Luas Daerah Kecamatan Labakkang  
Per Desa/ Kelurahan

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km)	Keterangan
1.	Kelurahan Mangallekana	6,88 km	3 Desa
2.	Kelurahan Pundata Baji	5,22 km	2 Desa
3.	Kelurahan Bori Masunggu	5,22 km	2 Desa
4.	Kelurahan Labakkang	4,50 km	2 Desa
Jumlah		98,46 km	9 Desa

Sumber data : Kantor Kecamatan Labakkang, Tahun 2000

Pada tabel tersebut diatas menyatakan bahwa yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Mangallekanadengan luas 6,88 km dan yang paling sempit wilayahnya adalah kelurahan Labakkang, yakni 4,50 km.

Wilayah kecamatan Labakkang secara keseluruhan merupakan hamparan dataran rendah yang hampir seluruhnya adalah areal persawahan dan pertambakan, hal ini merupakan potensi wilayah yang sangat menguntungkan dalam proses pembangunan karena sangat penting artinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Labakkang ini.

Selain sebagai areal pertanian masih terdapat pula dalam wilayah lainnya yang dimanfaatkan berkebun yang kesemuanya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **C. Keadaan Demografis**

Keadaan penduduk di kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dari segi jumlah maupun kualitasnya, dari segi jumlah penduduk kecamatan Labakkang tergolong banyak jumlahnya maka memungkinkan untuk pembangunan daerah ini terbuka lebar karena didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar.

Dari kualitas seperti tingkat pendidikan masyarakat kelompok umur potensial (usia muda) dan mata pencaharian penduduk, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dikemukakan beberapa aspek demografi di Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

### **1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Telah kita ketahui bahwa pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, ini berarti bahwa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya maka seluruh lapangan dan kehidupan manusia Indonesia harus dibangun secara bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia merupakan subjek dan objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan maka setiap manusia Indonesia merupakan pelaksana pembangunan, dan sebagai objek pembangunan bahwa setiap manusia Indonesia merupakan sasaran secara adil dan merata sesuai dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari hal tersebut di atas maka faktor penduduk merupakan potensi pembangunan yang sangat menentukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan dalam wilayah masing-masing, penduduk tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan

pembangunan, sehingga usaha bersama dari seluruh rakyat dapat dirasakan sebagai usaha nyata dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

## **2. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia pada umumnya, begitu juga penduduk yang ada dalam wilayah kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pentingnya faktor mata pencaharian ini karena dengan melalui faktor ini penduduk akan memperoleh suatu hasil yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, maupun kebutuhan masyarakat lainnya baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan non material.

Sehubungan dengan pentingnya peranan mata pencaharian dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sehingga mata pencaharian itu sendiri telah menjadi pula suatu kebutuhan yang sering dirasakan mendesak untuk memenuhinya, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hingga dewasa ini, termasuk dalam wilayah kecamatan Labakkang hingga dewasa ini, termasuk dalam wilayah kecamatan Labakkang kabupaten Pangkep berada dalam usaha memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang ada secara terus menerus.

Dengan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja, khususnya pengangguran, disamping merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya yang bersangkutan dengan penghasilannya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, juga berarti ikut sertanya penduduk atau tenaga kerja tersebut dalam proses pembangunan karena dengan bekerja berarti melakukan kegiatan produksi baik berupa jasa yang diperlukan untuk pembangunan, termasuk jika tenaga kerja tersebut secara langsung mengerjakan proyek pembangunan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja bagi penduduk desa.

Mata pencaharian penduduk bukan cuma diharapkan dalam suatu bidang usaha tertentu, melainkan yang bersifat heterogen, karena dengan bermacam-macam lapangan usaha yang dilakukan penduduk, akan berarti terbukanya kemungkinan yang luas bagi tersedianya berbagai keuntungan yang diperlukan oleh penduduk atau masyarakat itu sendiri.

### **3. Pendidikan**

Selain mata pencaharian sebagai faktor yang sangat penting artinya bagi setiap manusia, pendidikan juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan mata pencaharian.

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia pada umumnya karena dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan tertentu merupakan sarana bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan pendidikan yang cukup merupakan modal bagi setiap orang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pentingnya pendidikan pada setiap manusia pada umumnya, khususnya oleh bangsa Indonesia sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pemerintah mempunyai tugas yang sangat penting yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tersebut telah dijabarkan pula dalam GBHN dan selanjutnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang didasarkan atas instruksi presiden dan sebagainya, seperti penyempurnaan kurikulum pendidikan, penyempurnaan bahan-bahan pelajaran, alat-alat praktikum, peningkatan kualitas guru, bujang sekolah dan penempatannya serta berbagai kebijaksanaan lainnya.

Perhatian terhadap bidang-bidang pendidikan tersebut, bukan hanya pada suatu daerah atau wilayah tertentu melainkan secara

keseluruhan termasuk dalam wilayah kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dimana dalam hal ini ditandai dengan pembangunan tempat ibadah (mesjid) dan berbagai kebijaksanaan lainnya di bidang pendidikan. Usaha yang dilakukan ini tidak lain dimaksudkan agar supaya yang dilakukan itu benar-benar dapat mencapai sasaran.

Kebijaksanaan untuk mengembangkan bidang pendidikan tersebut bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa semata, melainkan diharapkan dengan pengetahuan yang dimilikinya diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi jika dikaitkan dengan tugas nasional yang sangat penting dewasa ini yaitu pembangunan.

Pembangunan harus ditingkatkan secara terus menerus, baik kegiatannya maupun hasil-hasilnya membutuhkan manusia Indonesia yang dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam pembangunan, baik fungsi penelitian, pelaksanaan, maupun berbagai fungsi lainnya yang diperlukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan dalam berbagai bidang.

Salah satu faktor yang penting dalam usaha meningkatkan bidang pendidikan untuk menderdaskan kehidupan bangsa yaitu berupa pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah, sebagai wadah pendidikan formal yang sangat menentukan.

Keadaan penduduk kecamatan Labakkang kabuoaten Pangkajene dan Kepulauan berjumlah 40.080 orang, yang terdiri dari laki-laki 18.459 jiwa dan perempuan berjumlah 21.620 jiwa orang sesuai dengan daftar berikut :

Tabel 02  
Data Potensi Kecamatan Labakkang / Kelurahan/ Desa

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km)	Penduduk			Ket
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Labakkang	4,50	2.378	2.719	5.097	Kel
2.	Mangallekana	6,88	1.716	1.952	3.668	Kel
3.	Bori Sunggu	5,22	1.340	2.220	3.560	Kel
4.	Pundata Baji	5,22	1.835	2.100	3.935	Kel
5.	Manakku	9,08	1.958	1.106	2.164	Desa
6.	Bonto Manai	6,38	949	1.049	1.998	Desa
7.	Gentung	7,63	1.013	1.054	2.067	Desa
8.	Kanaungan	11,37	1.672	1.927	3.599	Desa
9.	Kassiloe	6,88	999	1.081	2.080	Desa
10.	Pattalassang	7,36	894	1.095	1.989	Desa
11.	Batara	6,64	1.526	1.090	3.476	Desa
12.	Taraweang	9,91	1.631	1.810	3.441	Desa
13.	Bara Batu	10,85	1.448	1.558	3.006	Desa
	Jumlah	98,46	18.495	21.621	40.080	

Sumber data : Kantor Camat Labakkang, Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas bahwa yang paling padat penduduknya ialah kelurahan Labakkang dan yang paling sedikit penduduknya ialah kelurahan Bori Masunggu.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh tanah air, terutama di daerah pedesaan, maka pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan mengenai program bantuan pembangunan desa yang diberikan pada setiap desa/kelurahan, dengan tujuan agar desa tersebut dapat membangun desa dan masyarakat disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh desa/kelurahan yang bersangkutan.

Di Kecamatan Labakkang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikatakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan bersama.

Usaha untuk menggerakkan atau mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan rasa tanggung jawab, karena tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam pembangunan, maka pembangunan tidak mungkin berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah dalam kedudukannya sebagai motivator sangat menentukan.

Di Kecamatan Labakkang selain pemerintah sebagai motivator dalam penggerak partisipasi masyarakat, masyarakat di wilayah tersebut juga sudah menyadari dirinya untuk turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan melihat adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong-royong masyarakat desa yang berada di setiap desa di wilayah ini, yang mana dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela dengan penuh rasa kekeluargaan. Hal tersebut merupakan suatu sumbangan dalam daerah ini yang tak ternilai harganya, dan hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Seperti perbaikan jalan lorong, perbaikan selokan, penataan pagar, merehabilitasi mesjid dan tempat-tempat ibadah serta pembuatan jembatan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya agar hubungan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan pembangunan Nasional di dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah lebih mendorong agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah suatu

usaha pendayagunaan daya, tenaga dan dana yang terkandung dalam masyarakat.

Dana, tenaga dan daya tersebut di proses dan diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan yang menjadi kebutuhan sendiri, baik usaha pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan yang ada kaitannya dengan proyek pemerintah maupun inisiatif masyarakat itu sendiri yang berbentuk swadaya masyarakat.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong-royong dalam masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini, yang dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela dan penuh rasa kekeluargaan tersebut, merupakan suatu sumbangan dalam pembangunan daerah ini yang tidak ternilai harganya dan hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Jika kondisi yang demikian ini tetap dipelihara dan dibina, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat proyek-proyek yang lebih banyak lagi dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat pedesaan, sehingga dapat hidup tenteram dan damai.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka sesuai dengan tanggapan responden partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 03**  
**Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat**  
**Dalam Pembinaan Desa**

No	Bentuk Partisipasi	Responden	Prosentase (%)
1.	Kesadaran sendiri	35	44
3.	Anjuran pemerintah	23	29
3.	Perintah atasan	13	17
4.	Paksaan	9	10
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 daftar angket yang penulis edarkan, yang menjawab bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena didarakan atas kesadaran sendiri, sebanyak 35 orang (44%), menyusul karena anjuran pemerintah sebanyak 23 orang (29%), karena pemerintah atasan sebanyak 13 orang (17%), sedangkan karena paksaan sebanyak 9 orang (10%).

Berdasarkan jawaban para responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didasarkan atas kesadaran sendiri di daerah ini cukup tinggi. Dengan demikian, maka masyarakat di dalam wilayah Kecamatan Labakkang cukup membanggakan dan perlu dipelihara serta

dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga pembangunan disegala bidang benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Disamping itu melalui pengamatan penulis pada tingkat yang paling bawah, cenderung menunggu perintah. Misalnya jika terjadi kerusakan-kerusakan pembangunan (misalnya jembatan, jalanan dan lain-lain sebagainya), tidak pernah terlihat dengan kesadaran sendiri untuk memperbaikinya, melainkan menunggu perintah/ instruksi dari pemerintah (Kepala Desa/Lurah).

Begitulah kalau tanpa diikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang terjadi pengerahan tenaga berdasarkan perintah dari Kepala Desa atau Kelurahan, sehingga memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mengawasi hasil pembangunan kurang baik.

#### *Angkatan* **B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Labakkang yaitu meliputi berbagai bentuk swadaya secara gotong-royong yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Swadaya dalam bentuk pemikiran
2. Swadaya dalam bentuk tenaga

3. Swadaya dalam bentuk uang
4. Swadaya dalam bentuk bahan dan barang.

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan tentang cara peningkatan partisipasi masyarakat, akan tetapi perlu dipertanyakan kepada siapa yang perlu diajak berpartisipasi.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kepraktisan, maka cara untuk menumbuhkan partisipasi ialah dengan mengetahui siapa yang perlu diperhatikan untuk diajak berpartisipasi. Selama ini partisipasi terutama diperlukan atau diperlukan masukan dalam proses terjadinya pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Di Kecamatan Labakkang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di dalam Kelurahan yang telah diambil sebagai sampel/responden.

Pada umumnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Labakkang diorganisir melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di setiap Desa/Kelurahan. Melalui LKMD tingkat-tingkat swadaya masyarakat akan nampak atau nyata. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup pembahasan mengenai partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Desa dan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik.

Adapun partisipasi masyarakat yang paling dominan dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dapat dilihat hasil angket/wawancara dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 04  
Bentuk Partisipasi Masyarakat  
Yang Menonjol dalam Pembangunan  
Di Kecamatan Labakkang

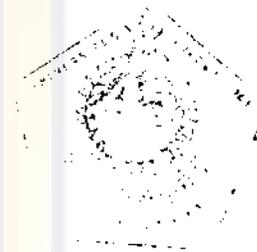
No	Bentuk Partisipasi	Responden	Prosentase (%)
1.	Uang	13	17
3.	Pikiran	15	20
3.	Tenaga	37	48
4.	Barang/Bahan	10	15
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas, bahwa partisipasi yang dominan adalah dalam bentuk tenaga, yakni 37 orang atau 48%. menyusul dalam bentuk pikiran, yaitu 15 orang 20%, dan swadaya dalam bentuk barang / bahan yakni 10 orang atau 15% .

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala wilayah kecamatan Labakkang ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk :

- Swadaya gotong royong fisik.
- Membikin jalan-jalan desa jembatan.
- Posyandu.
- Penggalian selokan.
- Mendukung peraturan pemerintah.
- Melaksanakan pemerintah secara ikhlas.



Dana yang bersumber dari pemerintah dimaksudkan untuk memancing partisipasi pedesaan. Sedangkan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat pedesaan merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan diseluruh kelurahan dan desa.

Partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan dewasa ini. Sedangkan dana bersumber dari masyarakat stempat. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka akan meningkatkan kegiatan usaha pembangunan, antara lain diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan terciptanya pembagian bebandan hasil pembangunan masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan

daftar angket yang penulis edarkan yaitu 35 lembar, maka jawaban responden dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 05  
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan

No	Tanggapan	Responden	Prosentase (%)
1.	Baik	30	45
3.	Cukup baik	25	32
3.	Rendah	11	13
4.	Sangat rendah	8	10
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan tabel diatas, maka dapatlah diketahui bahwa jawaban responden yang mengatakan baik sebanyak sebanyak 36 orang atau 45% cukup baik sebanyak 25 orang atau 32%, rendah sebanyak 11 orang atau 13% sedangkan sangat rendah sebanyak 8 orang atau 10%.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan Labakkang cukup baik, yang merupakan modal utama yang tidak

ternilai harganya didalam memacu dan menunjukkan pembangunan di segala bidang.

Sebagaiman kita ketahui bahwa salah satu tujuan pembangunan tujuan itu sendiri terarah kepada usaha meningkatkan tararaf hidup dan memperluas lapangan kerja berarti perluasan partisipasi masyarakat.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk mencapai tujuan tersebut, maka bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar masyarakat berrpartisipasi dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan Labakkang karena animo atau kesadaran masyarakatikut berpartisipasi aktif didalam pembangunan disegala bidang. Ini dapat terbukti berdasarkan tanggapan masyarakatatau responden sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan kepada mereka yaitu sebanyak 35 angket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 06  
Tanggapan Responden Tentang Animo Masyarakat  
Dalam Partisipasi Dalam Pembangunan

No	Tanggapan	Responden	Prosentase (%)
1.	Tinggi	24	30
3.	Cukup	12	15
3.	Sangat tinggi	11	14
4.	Sedang	23	29
5.	Rendah	10	12
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui animo masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan tinggi, yakni sebanyak 24 orang atau 30%, menyusul cukup tinggi 12 orang atau 15%, sangat tinggi sebanyak 11 orang atau 14%. sedangkan 23 orang atau 29%. kemudian yang berpendapat rendah sebanyak 10 orang atau 12%.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa animo masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Labakkang cukup tinggi. Kalau masyarakat sudah merasa bahwa pembangunan adalah miliknya, maka ia akan menjaga, memeliharanya, dan mengawasinya. Kalau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka

masyarakat akan menegur, karena pembangunan adalah milik semua warga desa.

Adapun partisipasi berdasarkan keinginan/inisiatif dan tidak ada paksaan akan menghasilkan pembangunan berkualitas, menimbulkan rasa ikut memiliki atau rasa ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

### C. Faktor-faktor yang Menghambat dan Pemecahannya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 07  
Tanggapan Responden Tentang Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Penghambat	Responden	Prosentase (%)
1.	Kurangnya tenaga terampil	15	19
2.	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat	30	38
3.	Sikap mental apatis	12	15
4.	Sikap mental loyal	12	15
5.	Budaya/adat istiadat	11	13
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, yang paling dominan sesuaidengan jumlah responden dari 80 angket yang diedarkan, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebanyak 20 orang (38%), menyusul kurangnya tenaga terampil yakni 15 orang (19%), kemudian sikap mental apatis sama banyaknya dengan sikap mental yang loyal yakni 12 orang (15%), dan budaya/adat istiadat sebanyak 13 orang (13%)

Sesuai dengan data di atas, maka kita mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai responden.

***1. Rendahnya tingkat kesadaran sebagian anggota masyarakat.***

Sebagaimana uraian yang dijelaskan, bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh anggota masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak demi suksesnya pembangunan, dengan kata lain bahwa tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat, maka pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana atau mencapai hasil yang maksimal.

Kalau hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan di wilayah Kecamatan Labakkang, masih terdapat sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Apabila dilihat daripada partisipasi masyarakat di daerah ini cukup baik, namun dibalik dari pada itu masih ada saja diantar kelompok kecil masyarakat yang masih kurang menyadari tentang partisipasi masyarakat di segala bidang. “  
(Syarifuddin, Tokoh Agama),

Dari wawancara tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa masih ada diantara sekelompok kecil masyarakat yang belum menyadari tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana telah diketahui pada pembahasan di atas, bahwa proses pelaksanaan pembangunan memerlukan waktu yang relatif lama, maka masyarakat dituntut untuk bersabar secara suka rela untuk memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

Hal ini jelas seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat selaku responden yang mengatakan bahwa:

“Satu hal yang merupakan hambatan pelaksanaan pembangunan di desa yaitu adanya sejumlah anggota

masyarakat yang sekalipun telah di nilai mampu untuk memberikan sumbangannya sepanjang tidak langsung dimana oleh petugas LKMD, yang diberi tugas untuk mengumpulkan swadaya masyarakat, keadaan seperti ini membutuhkan waktu dan tenaga tidak sedikit untuk terkumpulnya dana pembangunan sesuai dengan yang diharapkan." (Tokoh Tani).

Jelas bahwa dengan adanya tingkat kesadaran yang relatif rendah merupakan salah satu hambatan.

## **2. Kurangnya tenaga terampil.**

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan perlu ditingkatkan, diperlukan tenaga yang terampil dalam melaksanakan berbagai fungsi dalam pembangunan tersebut, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun bidang pengawasan.

Selain hal tersebut, dimaklumi pula bahwa pembangunan yang mengiginkan hasil dalam bentuk material dan non material, dalam hal ini terutama untuk peningkatan produksi sebagai syarat tercapainya produksi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan kurangnya tenaga terampil di dalam pelaksanaan pembanguanan di wilayah Kecamatan Labakkang ini, merupakan salah satu faktor penghambat didalam pembangunan. Berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan salah satu responden menyatakan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan dan ditingkatkan di wilayah Kecamatan Labkkang sudah terlaksana, namun yang menjadi hambatan adalah masih kurangnya tenaga terampil dalam pelaksanaan pembangunan”. (Drs Tajuddin) selaku Tokoh Pendidik.

### **3. Skap mental yang apatis**

Kesibukan dalam pekerjaan menyebabkan masyarakat bersipat apatis dalam melaksanakan proyek proyek pembangunan daerah, yaitu masyarakat petani sibuk dengan pekerjaan di sawah, di samping kesibukan-kesibukan diluar kesibukan pokok. Masyarakat pengusaha sibuk dengan usahanya di samping sedikit sekali waktu terluang untuk istirahat dirumahny. Masyarakat pegawai sibuk dengan pekerjaan dikantor, baik dalam bentuk pekerjaan dinas atau pekerjaan ekstra, seperti menghadiri pertemuan, organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan keluarga, berolah raga dan sebagainya.

Kesibukan-kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam arti membangun fikiran, sumbangan material dan yang hanya

terdapat dalam masyarakat yakni sukar untuk memampatkan pembangunan daerah yang ada di desanya. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yaitu tokoh agama mengatakan bahwa:

“Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan ditingkatkandi wilayah Kecamatan Labakkang sudah terlaksana namun salah satu penghambatnya, yaitu dengan adanya mental yang apatis, maksudnya adanya sebahagain masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dimana selain pekerjaan pokok juga sibuk dengan pekerjaan sampingan, dengan demikian kesibukan masyarakat dengan pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan.” (Tokoh Agama)

Dengan demikian, jelas bahwa adanya sikap mental yang apatis dapat manghambat pelaksanaan pembangunan, yakni kesibukan masyarakat dengan pekerjaan masing-masing, sehingga sumbangan material yang ada tersedia dalam masyarakat, sukar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah yang ada di desanya.

#### **4. Sikap mental yang tidak loyal.**

Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat dikarenakan keluhan-keluhannya tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

#### **5. Budaya/adat istiadat.**

Dari beberapa hambatan yang telah dikemukakan di atas, ada hambatan lain yaitu budaya/adat istiadat yang dianut dalam masyarakat, yaitu adanya status sosial (bangsawan dan masyarakat biasa), dimana pada masyarakat bangsawan kurang melibatkan tenaganya pada pelaksanaan pembangunan. Karena menganggap dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada masyarakat biasa.

### **D. Langkah-langkah yang Ditempuh Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan desa adalah adanya swadaya gotong royong.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam usaha mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk dapat berswadaya dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang telah ditempuh usaha-usaha antara lain:

1. Dengan memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti, tujuan dan manfaat daripada

pembangunan, dengan memberi penjelasan bahwa pembangunan ini merupakan proses yang menghendaki adanya perubahan-perubahan, kondisi atau keadaan kearah yang lebih baik dan mempunyai tujuan suatu masyarakat yang adil dan makmur di seluruh pelosok tanah air, terutama untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.

2. Membangun proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola masyarakat dengan swadaya masyarakat, baik yang bersifat material maupun yang berupa tenaga kerja.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan faktor penghambat seperti yang di uraikan tadi, antara lain:

- a. Pemerintah wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan anggaran pembangunan dapat menyediakan dana yang dimaksud untuk menyelenggarakan usaha peningkatan keterampilan penduduk di desa.
- b. Upaya peningkatan kesadaran sebagian anggota masyarakat desa (LKMD) dan tokoh masyarakat lainnya secara terus menerus dengan berusaha melalui berbagai upaya seperti ceramah, penyuluhan, baik pada tempat-tempat ibadah, melalui sarana/wadah lainnya, sehingga masyarakat pada akhirnya

dapat semakin sadar dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal yang merupakan syarat suksesnya pembangunan.

- c. Sikap mental yang apatis diusahakan menjadi sikap mental yang sosial, yaitu dengan jalan mengadakan pembagian kerja yang teratur, sehingga bagaimana pun kesibukan-kesibukan dalam pekerjaannya, dapat meluangkan waktu untuk melayani persolan pelaksanaan proyek pembangunan daerah di desanya.
- d. Sikap mental yang tidak loyal.

Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat sedapat mungkin dihindarkan dengan mendengarkan keluhan-keluhan anggota masyarakat. Keterampilan kepala desa/ kelurahan untuk berkonsultasi dikembangkan dengan mengembangkan argumentasi yang tepat mengenai keluhan-keluhan masyarakatnya.

- e. Sedapat mungkin bagi golongan bangsawan yang kurang melibatkan diri dalam pelaksanaan pembangunan, agar menyumbangkan uang atau materi supaya ada keseimbangan dan rasa kebersamaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan khususnya terhadap proyek fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan swadaya masyarakat menunjukkan bahwa tingkat

partisipasi di Kecamatan Labakkang ternyata lebih tinggi dari bantuan dana yang tersedia. Untuk mengetahui sejauhmana dan bagaimana peranan bantuan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dari sejumlah responden dari kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiaya oleh bantuan pemerintah terhadap pembangunan desa sebagai berikut :

1. Penilaian responden terhadap prasaran-prasarana menyangkut tentang bidang penyelenggaraan program inpers bantuan desa, maka keseluruhan responden memberikan penilaian yang sama bahwa program pembangunan desa yang dilaksanakan pada umumnya adalah membawa hasil bagi kehidupan masyarakat desa setempat.

Adapun yang menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat yang ditimbulkan oleh inpers bantuan desa, bagi penilaian masyarakat desa itu sendiri bagi segenap proyek pembangunan yang berhasil dibangun.

Berdasarkan hasil survei ternyata pemanfaatan proyek-proyek pembangunan maka penilaian responden dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 08**  
**Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Prasarana Produksi**

No	Urutan Penilaian	Responden	Prosentase (%)
1.	Bermanfaat	63	78,75
2.	Kurang bermanfaat	17	21,25
3.	Tidak bermanfaat	-	-
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel diatas terlihat bahwa penilaian responden terhadap kemanfaatan sejumlah proyek prasaranan produksi menunjukkan 78,75% menilai bermanfaat, 21,25% menilainya kurang bermanfaat sedang menilainya tidak bermanfaat tidak ada (0 %).

Tabel berikutnya menggambarkan penilaian responden terhadap kegunaan prasarana sosial :

**Tabel 09**  
**Tanggapan responden terhadap kegunaan Prasarana Sosial**

No	Urutan Penilaian	Responden	Prosentase (%)
1.	Bermanfaat	65	81,25
2.	Kurang bermanfaat	15	18,75
3.	Tidak bermanfaat	-	-
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Tabel diatas dapat dilihat bahwa kemanfaatan prasarana sosial menilai 81,25%, yang menilai kurang bermanfaat 18,75%, sedangkan yang menilai tidak bermanfaat 0%.

Nampak bahwa kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa yang paling bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat desa adalah prasarana produksi sesuai dengan kuesioner yang diperoleh dari responden.

Tabel berikut menggunakan mengenai bentuk-bentuk swadaya dari masyarakat desa sebagai berikut :

Tabel 10  
Bentuk-Bentuk Swadaya Responden

No	Bentuk Swadaya	Responden	Prosentase (%)
1.	Uang/ Harta Benda	50	62,5
2.	Tenaga	20	25
3.	Pikiran	10	12,5
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 62,5 % responden yang swadaya dalam bentuk uang/harta, menyusul 25 % menyumbang dalam bentuk tenaga, dan yang menyumbang dalam bentuk pikiran 12,5%

Masyarakat berswadaya dalam bentuk pikiran artinya masyarakat dapat menyumbangkan ide dan gagasan di dalam kegiatan pembangunan desa dalam hal ini ide dan gagasan tersebut disalurkan melalui kepada lembaga ketahanan masyarakat yang ada dan tokoh masyarakat yang dipercayakan dan selanjutnya meneruskannya dalam rapat LKMD dalam rangka perumusan dan perencanaan proyek yang akan dibangun.

Tabel berikut mengungkapkan alasan atau motivasi keikutsertaan para responden terhadap pelaksanaan (pembiayaan proyek-proyek fisik seperti pada tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Motif-motif Keikutsertaan Responden Dalam**  
**Pembiayaan Proyek-Proyek Fisik**

No	Variasi Keikutsertaan	Responden	Prosentase (%)
1.	Merasa berkepentingan	35	43,75
2.	Kegotongroyongan/ kebersamaan	30	37,5
3.	Ketaatan pada pemimpin	15	18,75
4.	Terpakasai atau tidak terpaksa	-	-
Jumlah		80	100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 43,75% menyatakan ikut partisipasi karena merasa berkepentingan selebihnya 37,5% menyatakan berpartisipasi karena motivasi kegotong-royongan atau perasan kebersamaan sebagai masyarakat kecamatan Labakkang dan hanya 18,75% mengatakan ikut berpartisipasi karena ketaatan kepada pemimpin.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjabaran tersebut adalah bahwa dari semua alternatif alasan atau jenis motivasi didasarkan karena merasa berkepentingan terhadap hasil-hasil proyek yang dibangun menduduki urutan teratas, kemudian disusun oleh motivasi kegotongroyongan sebagai anggota masyarakat.

Jika penelitian responden diatas dianggap mewakili pendapat dan sikap masyarakat desa pada umumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan yang dibiayai oleh impres bantuan desa mempunyai korelasi positif dengan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan menimbulkan swadaya gotong-royong masyarakat.

Faktor-faktor yang memperlancar timbulnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat, kesadaran masyarakat dan potensi dan potensi ekonomi Kecamatan Labakkang.

Masyarakat di Kecamatan Labakkang sangat membutuhkan pelaksanaan pembangunan diarahkan ke daerah mereka, pelaksanaan pembangunan tersebut untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi anggapan bahwa daerah pedesaan adalah daerah kawasan konsentrasi penduduk miskin, penurunan persentase penduduk miskin sekarang ini sudah memperlihatkan pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, kesadaran untuk membangun daerahnya juga sangat membantu kesuksesan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang, potensi alam maupun potensi sosial ekonomi di Kecamatan Labakkang sangat melimpah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Aspirasi masyarakat di Kecamatan Labakkang akan kebutuhan nampak dari kegiatan LKMD di daerah tersebut dalam memusyawarahkan rencana program pemerintah dalam pembangunan pada tingkat lingkungan sebelum dibawa ke tingkat kecamatan untuk dimusyawarahkan, hal tersebut menampakkan bahwa kebutuhan akan pembangunan di wilayah mereka jelas mencerminkan adanya kesadaran dan kesadaran warganya untuk berpartisipasi yang diharapkan dari pemerintah.

Adanya kendala yang terkadang mengurangi kebutuhan masyarakat akan adanya pembangunan di Kecamatan Labakkang

disebabkan oleh pengaruh kemajuan pesat yang dicapai di daerah tersebut.

Jawaban responden tentang faktor-faktor yang dapat berpengaruh besar terhadap tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah seperti yang tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 12  
Faktor-faktor yang Dapat Memperlancar Tumbuhnya  
Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Labakkang

No	Tingkat	Responden	Prosentase (%)
1.	Adaya kebutuhan masyarakat	18	22.5
2.	Kesadaran masyarakat	48	60
3.	Potensi daerah	14	17.5
Jumlah		80	100,0

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan hasil responden yang tampak pada tabel di atas diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang adalah kebutuhan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang demikian besar sehingga mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan segalah sesuatu yang dapat diberikan kepada daerah mereka.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk partisipasi dalam pembangunan di wilayah kecamatan Labakkang menunjukkan bahwa partisipasi berupa tenaga termasuk kategori yang paling menonjol, sedangkan partisipasi dalam bentuk bahan dan barang serta uang termasuk kategori yang sangat mendukung terciptanya pembangunan.
2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan Labakkang maka hasil-hasilnya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Adapun hasil-hasil pembangunan di wilayah kecamatan Labakkang yang telah dicapai dengan partisipasi masyarakat adalah :

- Rehabilitasi mesjid, perbaikan jalan serta penerangan.
- Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan besar dan kecil serta penataan pagar.

3. Bahwa berhasilnya pembangunan disegala bidang sangat ditentukan oleh adanya korelasi antara kedua kemampuan yaitu masyarakat dan pemerintah, oleh sebab itu pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, pemerintah memberikan bantuan untuk merangsang partisipasi masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi untuk memperlancar pembangunan.
4. Sebagai perwujudan dari kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya maka wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Labakkang adalah menyumbang segala sesuatu pada pembangunan suatu proyek tertentu, masyarakat juga bisa menyumbang pemikiran mereka berupa ide saran-saran serta berupa materi atau bahan yang diperlukan.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Labakkang sudah terbukti dari jawaban penelitian ini, perbandingan antara partisipasi dan bantuan pemerintah dalam pembangunan memperlihatkan gagasan yang menggembirakan yaitu jumlah dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang telah direncanakan sebelumnya.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para kepala desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan labakkang agar melakukan kordinasi dengan segenap aparat yang bertugas dalam wilayahnya kiranya memberikan penyuluhan kpada masyarakat akan perlunya partisipasi secara aktif dalam pembangunan tera masuk dalam pengumpulan swadaya masyarakat untuk pembangun unan .
2. Diharapkan pemerintah meoibetkan atau mengikut sertakan masyarakat secara lansung(repat) an memberikan tanggaps dan saran-saran dalam ruang lingkup yang lebih luas, memi nta inpormasi tentang segalaah sesuatu sebelum mengambil keputusan dalam perencanaannya, dan menjelaskan tantang , maksud dan tujuan p rencanaan pembangunan yang akan dilk laksanakan.
3. Disarankan pula agar masyarakat dapat memberikan dukunga n atau partisipasi aktifnya terhadap segalaah perencanaan program pemerintah yang telah direncanekannya.

6. Masalah yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah faktor kebutuhan masyarakat yang menantikan hasil-hasil pembangunan, kesadaran masyarakat dan potensi daerah, faktor ini bisa menjadi pendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sedangkan faktor yang dapat kurangnya tenaga terampil dalam pelaksanaan fungsinya baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pada bidang pengawasan.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar peranan pemerintah dalam menatap pembangunan betul-betul dilaksanakan dengan baik agar pembangunan merata dan dapat dirasakan dan dinikmati keberadaan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi pemusatan pembangunan di suatu tempat tertentu saja melainkan di seluruh pelosok tanah air.
2. Diharapkan agar pemerintah melibatkan dan menggikut sertakan masyarakat secara langsung kedalam rapat dan dapat memberikan tanggapannya dan saran-saran dalam ruang lingkup yang lebih luas, meminta informasi tentang segala sesuatu

sebelum mengambil keputusan dalam perencanaan, dan menjelaskan tentang maksud tujuan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Disarankan pula agar lembaga perbankan yang ada lebih berperan aktif membantu permodalan usaha masyarakat agar usaha tersebut bertambah maju dan penghasilan masyarakat meningkat sehingga partisipasi mereka akan meningkat pula dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang.
4. Disarankan agar masyarakat dapat memberikan dukungan atau partisipasi aktif terhadap segala perencanaan program pemerintah yang telah direncanakan.
5. Untuk mengarahkan masyarakat di dalam partisipasi pada pembangunan maka di harapkan pemerintah lebih tanggap pada keinginan-keinginan masyarakat serta dapat memberikan pengertian tentang betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di samping itu pemerintah secara langsung menyumbangkan pikiran, memberikan tanggapan, saran-saran serta memintah informasi dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, DR, 1994. *Manajemen Penelitian*, CV. Haji Masagung.
- Badri, Sofyan, Drs, 1993. *Konsep Dasar Adiministrasi Negara dan Adimnistrasi Pembangunan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Batten, R.T. 1996. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Alumni, Bandung.
- Daldjoen. N. 1982. *Pendesaan Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni Bandung.
- Djufrie. Muh. 1997. *Perencanaan Pembangunan*, LAN-RI Perwakilan SUL-SEL.
- Hagul Peter, 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Handyaningrat Soearno, 1982. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasan, sadeli, 1981. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Depertemen Traskopemade.
- Koentjaraningrat, 1981. *Masalah-masalah Pembangunan*, Jakarta, Bunga Rempi.
- Koentjaraningrat, 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia, Jakarta.
- K. Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar Jakarta.
- Ndraha, Talizidhu, 1997. *Pengertian dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Bina aksara.
- Sagir Suharsono, 1982. *Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Alumni Bandung.
- Salim Emil, 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.